

Bedah Buku

Sejalan dengan niat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik, maka diperlukan sebuah panduan yang memberikan tuntunan terhadap berbagai permasalahan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam terbitan kali ini kami akan membedah sebuah buku yang diterbitkan untuk maksud tersebut. Buku yang kami maksudkan adalah yang berjudul "Manajemen Pemerintahan Daerah".

Buku "Manajemen Pemerintahan Daerah" ini disusun oleh Tim Penulis Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (PKKOD-LAN) dengan penerbit yang sama. Berukuran 15 x 24 cm yang berisi 659 halaman utama dan 21 halaman tambahan. Melihat ukurannya maka buku ini dipersepsi memiliki isi yang cukup lengkap.

Tim Penulis membagi buku ini ke dalam 18 bab berdasarkan pokok bahasan yang berbeda-beda. Setiap bab umumnya berisi landasan teori lalu analisis dan ditutup dengan contoh implementasinya. Dengan susunan seperti ini pembaca dimudahkan karena langsung bisa mengikuti analisa masalah berdasarkan landasan teori / konsep. Kemudian pada bagian akhir wawasan pembaca diperkaya dengan contoh implementasi konsep tersebut dalam kehidupan nyata.

Bab 1 berjudul "Pendahuluan" yang berisi latar belakang penyusunan, tujuan dan materi muatan buku Manajemen Pemerintahan Daerah ini. Dalam bab tersebut disampaikan berbagai permasalahan yang muncul sebagai

implikasi perubahan sistem sentralistik menjadi lebih desentralistik sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak hanya itu, tetapi diceritakan pula juga kegamangan pemerintah daerah saat UU No. 22/1999 berubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bersama peraturan pelaksanaannya yang belum siap diterima oleh aparat di daerah sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan, baik penyimpangan hukum maupun kebijakan publik.

Bab 2 berjudul "Konsep Pemerintahan Daerah" yang menguraikan tentang konsep pemerintahan daerah, konsep desentralisasi, otonomi daerah, *good local governance*, dan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Bab 3 berjudul "Lingkungan Pemerintahan Daerah", membahas mengenai lingkungan yang terkait dengan berbagai faktor lingkungan strategik yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab 4 berjudul "Hubungan Pusat dan Daerah" yang membahas mengenai prinsip-prinsip, ruang lingkup dan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bab 5 berjudul "Perencanaan Daerah" yang menguraikan tentang landasan teori, aplikasi di Indonesia dan contoh implementasi perencanaan pembangunan daerah.

Bab 6 berjudul "Organisasi Pemerintahan Daerah" yang menguraikan

tentang landasan teori keorganisasian, tatanan organisasi pemerintahan daerah, permasalahan penataan kelembagaan pemerintahan daerah, dan pengembangan penataan organisasi pemerintah daerah.

Bab 7 berjudul “Pengawasan” yang menguraikan tentang landasan teori mengenai pengawasan landasan kebijakan, analisis dan pengembangan konsep pengawasan. Selain itu juga dilengkapi dengan contoh implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab 8 berjudul “Evaluasi Kinerja Daerah” yang menguraikan tentang landasan teori evaluasi, analisis implementasi evaluasi kinerja daerah dan pengembangan sistem evaluasi kinerja daerah, termasuk kerangka kerja serta alternatif model evaluasi kinerja daerah.

Bab 9 berjudul “Pelaporan dan Akuntabilitas Publik” yang berisi landasan teori akuntabilitas, landasan kebijakan yang meliputi jenis akuntabilitas penyelenggara negara dan penyelenggaraan akuntabilitas di daerah. Pada bagian akhir bab ini dipaparkan contoh implementasi pelaporan dan akuntabilitas publik di daerah.

Bab 10 berjudul “Aparatur Pemerintah Daerah” yang menguraikan landasan teori mengenai pengelolaan SDM khususnya SDM Aparatur di daerah. Disampaikan pula tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan aparatur pemerintah daerah, mulai dari penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan dan pemindahan, pemberhentian, penyesuaian, penggajian, kesejahteraan, dan pengembangan kompetensi. Dalam bagian analisis implementasi diuraikan mengenai proses rekrutmen, penilaian kinerja pegawai, promosi dan mobilisasi,

pendidikan dan pelatihan, remunerasi, kesejahteraan pegawai, dan disiplin pegawai. Bab ini ditutup dengan contoh implementasi penerapan kebijakan aparatur pemerintah daerah.

Bab 11 berjudul “Kepemimpinan Daerah” yang berisi landasan teori kepemimpinan, analisis mengenai kepemimpinan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, definisi pemimpin daerah dan peran pemimpin daerah dalam era otonomi. Sebagai contoh implementasi, ditampilkan kasus kepemimpinan di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Solok.

Bab 12 berjudul “Sistem dan Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan” yang berisi landasan teori perundang-undangan. Sebagai landasan kebijakan dibahas mengenai landasan kebijakan peraturan perundang-undangan secara umum dan yang diterapkan di daerah. Dalam analisisnya di dijelaskan mengenai berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan peraturan di daerah dan sebagai contoh implementasinya dituliskan proses penyusunan Perda.

Bab 13 berjudul “Keuangan Daerah” yang berisi konsep desentralisasi fiskal dan bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang meliputi dana desentralisasi, dekonsentrasi dan pinjaman daerah. Tidak ketinggalan dibahas mengenai dana perimbangan yang terisi dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain itu dipaparkan pula mengenai aspek-aspek kekuasaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara untuk contoh

implementasinya diambil dari praktek di negara lain.

Bab 14 berjudul “Aset Daerah” berisi mengenai landasan teori mengenai aset daerah serta landasan kebijakan aset daerah. Kemudian dibahas juga mengenai analisis implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah dan permasalahannya. Sebagai contoh implementasinya diambil dari manajemen aset daerah di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Jembrana.

Bab 15 berjudul “Standar Pelayanan Publik” yang berisi konsep pelayanan publik, paradigma pelayanan publik dan standar pelayanan publik. Selain itu dibahas juga mengenai dinamikan dan problematika pelayanan publik pada era otonomi daerah.

Bab 16 berjudul “Sistem Informasi Manajemen dan E-Gov” yang berisi landasan teori mengenai masyarakat informasi, Sistem Informasi Manajemen dan *Electronic Government*. Landasan kebijakan dan analisis yang menguraikan tentang identifikasi kebutuhan, *Masterplan E-Gov* dan infrastruktur informasi elektronik. Tidak ketinggalan pula contoh implementasinya.

Bab 17 berjudul “Kerjasama Antar Pemerintah Daerah” yang membahas mengenai makna kerjasama antar daerah, dasar kebijakannya dan tujuan kerjasama tersebut. Lebih lanjut lagi dipaparkan mengenai prinsip-prinsip dasar, bentuk kerjasama, tahapan, dan mekanismenya serta contoh implementasinya.

Bab 18 berjudul “Demokrasi Lokal” yang berisi konsep demokrasi lokal, konsep partisipasi masyarakat dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat.

Digambarkan pula praktek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di beberapa negara tetangga. Pada bagian akhir dituliskan pula analisis dan contoh implementasinya.

Sebagai buku yang ingin menjadi panduan bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah, maka buku ini sudah cukup memuaskan. Karena pokok bahasannya yang cukup beragam sehingga bisa menjawab pertanyaan pembaca mengenai hal ihwal pemerintahan daerah. Akan tetapi ada beberapa kelemahan dari buku ini, yaitu :

- Isu atau pembahasan kebijakan dapat berubah karena perbuahan kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Komposisi isi yang terlalu padat sehingga agak susah dicerna.
- Ukuran yang terlalu tebal sehingga kurang menarik minat pembaca pemula.
- Isi tulisan yang berasal dari berbagai penulis, sehingga gaya penulisannya pun berbeda-beda.
- Mengcover banyak hal akan tetapi kurang mendalam pembahasannya.

Tapi di luar kelemahan yang ada, buku ini mampu menjadi *guidance-book*, memberikan penyegaran dan pengayaan bagi aparat pemerintah di daerah serta menjadi *milestone* bagi pembuatan buku-buku sejenis.

